



PEMERINTAH  
KABUPATEN BANTUL

# CALK BAPPEDA

Catatan Atas Laporan Keuangan

# 2023



BAPPEDA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BANTUL

Jl. RW Monginsidi No.1 Komplek Parasamya Bantul,  
Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga dapat tersusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan sampai dengan akhir tahun 2023

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan ini masih jauh dari sempurna dan kami mengharapkan masukan saran maupun kritik dari para pengguna Laporan Keuangan ini. Untuk kedepannya kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan dengan tepat waktu dan akurat sehingga dapat terwujud tata kelola pemerintah yang baik dan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bantul Januari 2024

Kepala

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL" at the top and "BANTUL" at the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp, the word "BAPPEDA" is written in a bold, sans-serif font. A blue ink signature is written over the stamp, extending to the right. To the right of the stamp, there is a handwritten checkmark.

Ir. Fenty Yusdayati, M.T.  
NIP. 196704031994032008

## DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	ii
Daftar isi	iii
Pernyataan Tanggungjawab	iv
Bab I	1
Pendahuluan	1
1.1 Maksud dan Tujuan Pelaporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3 Sistematika Penulisan CALK	3
Bab II	5
Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD	
2.1 Ekonomi Makro	5
2.2 Kebijakan Keuangan	21
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja	21
Bab III	32
Ikhtisar Pencapaian Kinerja dan Keuangan	32
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	32
3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target	36
Bab IV	37
Kebijakan Akuntansi	37
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	37
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan	37
4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan	37
Bab V	41
Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan	41
5.1 Perincian dan Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Belanja	43
Bab VI	49
Informasi Informasi Non Keuangan	49
Bab VII	51
Penutup	51
Lampiran	LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul yang terdiri dari: (a) Surat Pernyataan, (b) Laporan Realisasi Anggaran APBD, (c) Laporan Operasional (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e) Neraca, (f) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bantul, Januari 2024

Kepala 



Ir. Fenty Yusdayati, M.T.  
NIP. 196704031994032008

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Organisasi Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan kepada stakeholder, mengenai posisi keuangan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama satu periode pelaporan. Penyusunan laporan keuangan ini juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan dalam rangka

- a. akuntabilitas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan, dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik;
- b. membantu para pengguna laporan keuangan, untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama satu periode pelaporan, sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana yang dikelola Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk kepentingan masyarakat;
- c. transparansi dalam memberikan informasi keuangan kepada seluruh masyarakat, berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan penyusunan laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 adalah

- a. menyediakan informasi mengenai keuangan, capaian kinerja dalam satu tahun anggaran;
- b. menyediakan informasi tentang kesesuaian anggaran dengan hasil yang dicapai.

## **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Pelaporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, yaitu

- a. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- d. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- l. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- m. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;

- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 174 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
- o. Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul;
- p. Peraturan Bupati Bantul Nomor 180 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Standarisasi Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023
- q. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tanggal 20 Juli 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026
- r. Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- s. Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023

### **1.3. Sistematikan Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul sebagai berikut.

#### **Bab I                   Pendahuluan**

Bab ini berisi penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan atas laporan keuangan.

#### **Bab II                   Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**

Bab ini memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta realisasi keuangan

dibandingkan periode sebelumnya, dan penjelasan mengenai pencapaian target kinerja

**Bab III                    Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja**

Bab ini memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan serta kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja tersebut.

**Bab IV                    Kebijakan Akuntansi**

Bab ini memuat informasi mengenai entitas akuntansi pelaporan keuangan, informasi mengenai basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, informasi mengenai penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan laporan keuangan, dan informasi tentang kebijakan akuntansi yang telah diterapkan atas pos-pos laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI.

**Bab V                    Penjelasan Pos Pos Laporan Keuangan**

Bab ini memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

**Bab VI                    Penjelasan atas Informasi Informasi Non Keuangan**

Bab ini berisi informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan.

**Bab VII                    Penutup**

**BAB II**

**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN  
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

**2.1. Ekonomi Makro**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 174 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, Bappeda mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan pengendalian, penunjang urusan penelitian dan pengembangan, serta fungsi perencanaan dan pengendalian penugasan urusan keistimewaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bappeda mempunyai fungsi:

1. perumusan program kerja Badan;
2. perumusan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian, penelitian, dan pengembangan;
3. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian, penelitian, dan pengembangan;
4. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan sumberdaya alam serta infrastruktur dan kewilayahan;
5. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pembangunan daerah;
6. pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan Badan;
7. pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Badan;
8. pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Badan;
9. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan serta budaya pemerintahan pada Badan;
10. pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan;

11. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
13. pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan; dan
14. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Penyusunan rencana pembangunan Kabupaten Bantul didasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam hal perencanaan dan pengendalian, ketersediaan dan akurasi data tetap menjadi perhatian, di samping itu sejumlah studi dilakukan untuk menjadi pedoman arah pembangunan ke depan. Untuk sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan pembangunan maka dilakukan koordinasi dengan pemerintah Desa, DIY dan Pusat.

Untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya, maka pada tahun 2023 ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mendapatkan alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp12.799.250.571,00 dengan rincian sebagai berikut

1. Belanja Operasi sebesar Rp12.748.000.571,00; meliputi:
  - Belanja Pegawai sebesar Rp6.480.774.981,00
  - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp6.267.225.590,00
2. Belanja Modal sebesar Rp51.250.000,00 meliputi:
  - Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp51.250.000,00

Dari anggaran sebesar Rp12.799.250.571,00 anggaran Dana Keistimewaan sebesar Rp899.576.000,00, terdiri dari 2 urusan, Bidang Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan sebesar Rp273.415.000,00 dan Bidang Urusan Sekretariat Daerah sebesar Rp626.161.000,00. Berdasarkan Berita Acara Perubahan Pertama Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bantuan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kabupaten Bantul Urusan/Kewenangan Kelembagaan Tahun Anggaran 2023 Nomor 918/11075 tanggal 3 Juli 2023, anggaran dana keistimewaan Bappeda mengalami perubahan/pergeseran dalam hal rincian anggaran/kode rekening belanja. Ini tertuang dalam perubahan kelima atas Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

Pada tanggal 23 Juni 2023 ditetapkan Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023. Perubahan/pergeseran ini terjadi pada Belanja Pegawai, yaitu anggaran gaji dan tunjangan Bappeda mengalami penambahan sebesar Rp951.000.000,00. Dari anggaran sebesar Rp6.480.774.981,00 bertambah menjadi Rp7.431.774.981,00, sehingga jumlah anggaran Bappeda menjadi sebesar Rp13.750.250.571,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar Rp13.699.000.571,00; meliputi:
  - Belanja Pegawai sebesar Rp7.431.774.981,00
  - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp6.267.225.590,00
- b. Belanja Modal sebesar Rp51.250.000,00 meliputi:
  - Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp51.250.000,00

Dalam Anggaran Perubahan, jumlah anggaran menjadi Rp14.027.903.771,00 dengan rincian sebagai berikut.

1. Belanja Operasi sebesar Rp13.903.693.771,00; meliputi:
  - Belanja Pegawai sebesar Rp7.310.224.981,00
  - Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp6.593.428.790,00

2. Belanja Modal sebesar Rp124.250.000,00 meliputi:

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp124.250.000,00

Berdasarkan Berita Acara Perubahan Kedua Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Bantuan Khusus Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Kabupaten Bantul Urusan/Kewenangan Kelembagaan Tahun Anggaran 2023 Nomor 918/17578 tanggal 20 Oktober 2023, anggaran Dana Keistimewaan mengalami pergeseran di kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan. Anggaran di Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan mengalami pergeseran/pengurangan dalam belanja honorarium tim kegiatan. Dari anggaran sebesar Rp454.450.000,00 berkurang menjadi Rp281.830.000,00 (berkurang sebesar Rp172.620.000,00). Ini tertuang dalam DPPA Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul No.62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 tanggal 17 Nopember 2023.

Dengan demikian jumlah anggaran pergeseran setelah perubahan sebesar Rp13.905.283.771,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi sebesar Rp13.781.033.771,00; meliputi:

- Belanja Pegawai sebesar Rp7.360.224.981,00
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp6.420.808.790,00

2. Belanja Modal sebesar Rp124.250.000,00 meliputi:

- Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp124.250.000,00

Adapun program kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 ini adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA  
URUSAN KEBUDAYAAN

1.1 Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya

1.1.1 Sub Kegiatan Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya

Deskripsi	:	Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, bidang urusan pemerintahan bidang kebudayaan. Kegiatan ini berupa fasilitasi forum warisan geologi (geoheritage) kabupaten bantul, fasilitasi pengelola situs warisan geologi sesar obak bukit mengger dan gumuk pasir parangtritis, serta rencana tapak gumuk pasir parangtritis.
Anggaran	:	Rp273.415.000,00
Output	:	Dokumen Rencana Tapak Gumuk Pasir Parangtritis

## 2. PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN

### 2.1 Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan

#### 2.1.1 Subkegiatan: Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan

Deskripsi	:	Rapat Koordinasi bersama TAPD dan OPD dalam rangka penyusunan dokumen rencana program Keistimewaan Tahun 2023 dan 2024 serta dokumen perubahan usulan Dais Tahun 2023
Anggaran	:	Rp281.830.000,00
Output	:	Dokumen Usulan Perubahan Kegiatan Dais 2023 Tahap I dan II, Usulan Kegiatan Dais Tahun 2024, Usulan Kegiatan Dais Tahun 2025,

#### 2.1.2 Subkegiatan: Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY

Deskripsi	:	Kegiatan ini dilaksanakan untuk melakukan pengendalian monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan BKK dana keistimewaan di kab bantul. Dari output 6 dokumen evaluasi tersebut disusun untuk laporan Triwulan 1, Triwulan 2, Triwulan 3, tahap 1 tahap 2 dan Triwulan 4 atau tahap 3.
Anggaran	:	Rp171.711.000,00
Output	:	Dokumen Laporan Pengendalian dan Evaluasi Dana Keistimewaan.

### 3. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

#### 3.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

##### 3.1.1 Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Deskripsi	:	Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2022 dan 2023 berupa kegiatan rapat koordinasi dan penggandaan dokumen
Anggaran	:	Rp59.425.000,00
Output	:	Dokumen Renja 2024, Dokumen Renja Perubahan 2023, Dokumen RKT 2023, dan Dokumen Perjanjian Kinerja Bappeda 2023

##### 3.1.2 Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Deskripsi	:	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang terdiri dari rapat koordinasi, penggandaan form kuisisioner SKM, serta penggadaan jasa tenaga informasi dan teknologi.
Anggaran	:	Rp6.825.000,00
Output	:	Dokumen SKM. Laporan capaian kinerja

#### 3.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

##### 3.2.1 Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan

Deskripsi	:	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN untuk Tahun Anggaran 2023
Anggaran	:	Rp7.171.664.981,00
Output	:	Gaji dan Tunjangan ASN

##### 3.2.2. Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Deskripsi	:	Pelaksanaan tugas ASN sebagai Penanggungjawab Pengelola Keuangan untuk Tahun Anggaran 2023
Anggaran	:	Rp125.160.000,00
Output	:	Honorarium untuk Pengelola Keuangan, Barang, dan Kepegawaian

3.2.3. Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Deskripsi	:	Pelaksanaan rapat koordinasi terkait dengan Laporan Keuangan Triwulan I, II, III, IV, dan akhir tahun untuk Tahun Anggaran 2023
Anggaran	:	Rp 2.800.000,00
Output	:	Dokumen Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Rapat Koordinasi

3.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

3.3.1. Subkegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Administrasi Kepegawaian

Deskripsi	:	Administrasi, pembinaan kepegawaian Tahun Anggaran 2023
Anggaran	:	Rp13.500.000,00
Output	:	Koordinasi, pembinaan kepegawaian

3.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

3.4.1. Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Deskripsi	:	Penyediaan instalasi listrik
Anggaran	:	Rp4.081.935,00
Output	:	Alat dan komponen instalasi listrik

2.4.2. Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Deskripsi	:	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Anggaran	:	Rp216.041.652,00
Output	:	Peralatan dan perlengkapan kantor yang terdiri dari ATK, benda pos, bahan komputer, peralatan dan perlengkapan kantor, publikasi

2.4.3. Subkegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Deskripsi	:	Penyediaan Peralatan Peralatan Rumah Tangga
Anggaran	:	Rp28.147.500,00
Output	:	Peralatan rumah tangga bahan dan peralatan kebersihan

#### 3.4.4. Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Deskripsi	:	Penyediaan Bahan Cetak dan penggandaan
Anggaran	:	Rp29.095.250,00
Output	:	Barang cetakan terdiri dari kertas kop bupati, banner, stopmap bappeda serta dokumen yang terdiri dari dokumen penggandaan, dokumen buku

#### 3.4.5. Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Deskripsi	:	Penyediaan bahan bacaan berupa pembelian buku dan langganan surat kabar untuk tahun 2021.
Anggaran	:	Rp2.400.000,00
Output	:	Tersedianya bacaan harian berupa surat kabar dan buku bacaan referensi.

#### 3.4.6. Subkegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Deskripsi	:	Pelaksanaan penerimaan kunjungan tamu dari dalam daerah dan luar daerah.
Anggaran	:	Rp12.500.000,00
Output	:	Laporan Kunjungan Tamu

#### 3.4.7. Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Deskripsi	:	Pelaksanaan rapat koordinasi yang terdiri dari rapat koordinasi internal bappeda, rapat koordinasi bappeda dengan OPD lain, rapat koordinasi dengan dinas dari daerah diluar Bantul serta perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah.
Anggaran	:	Rp387.731.000,00
Output	:	Pelaksanaan rapat dan Laporan Perjalanan Dinas.

#### 3.4.8. Subkegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Deskripsi	:	Pengelolaan arsip dinamis dan statis
Anggaran	:	Rp4.000.000,00
Output	:	Laporan penatausahaan arsip dan penyimpan arsip (Rak Arsip)

### 3.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### 3.6.1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Deskripsi	:	Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang terdiri dari jasa pengiriman dokumen sebagai penunjang kegiatan di Bappeda.
Anggaran	:	Rp300.000,00
Output	:	Pengiriman dokumen.

#### 3.6.2. Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

Deskripsi	:	Penyediaan Jasa Komunikasi, sebagai penunjang kegiatan di Bappeda.
Anggaran	:	Rp 12.000.000,00
Output	:	Tersediannya layanan telpon dan Zoom Meeting,

#### 3.6.3. Subkegiatan Penyediaan Jasa dan Perlengkapan Kantor

Deskripsi	:	Penyediaan Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor printer, cctv, projector, sound system, AC, computer, dan laptop.
Anggaran	:	Rp65.140.000,00
Output	:	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

#### 3.6.4. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor

Deskripsi	:	Penyediaan jasa yang berupa tenaga jasa perkantoran
Anggaran	:	Rp6161.768.600,00
Output	:	Laporan Kinerja tenaga administrasi, tenaga kebersihan, tenaga IT, dan tenaga supir.

### 4.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### 4.6.1. Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Deskripsi	:	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2
Anggaran	:	Rp191.122.600,00
Output	:	Terpeliharanya kendaraan dinas roda dua 22 unit dan roda empat 8 unit.

4.6.2 Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Deskripsi	:	Pemeliharaan rutin gedung kantor
Anggaran	:	Rp15.155.436,00
Output	:	Terlaksananya pemeliharaan gedung berupa pengecatan, pemeliharaan kamar mandi

4.PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

4.1.1 Subkegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik

Deskripsi	:	Pelaksanaan Konsultasi Publik RKPD 2024, RPJPD 2025-2045
Anggaran	:	Rp46.287.500,00
Output	:	Berita Acara Konsultasi Publik RKPD 2024 Berita Acara Konsultasi Publik RPJPD 2024-2045

4.1.2. Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD

Deskripsi	:	Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD
Anggaran	:	Rp7.942.500,00
Output	:	Berita Acara Forum Lintas PD

4.1.3 Subkegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota

Deskripsi	:	Musrenbang Kabupaten
Anggaran	:	Rp27.692.500,00
Output	:	Berita Acara Musrenbang RKPD 2024

4.1.4 Subkegiatan Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan

Deskripsi	:	Rapat Koordinasi, Musrenbang Kapanewon, Verifikasi Lapangan Usulan PIK, Dokumen Perencanaan Kewilayahan, Kamus Usulan Perencanaan, Kamus Usulan Pokir
Anggaran	:	Rp68.161.340,00
Output	:	Berita Acara Musrenbang Kapanewon, Usulan Prioritas Perencanaan Pembangunan Kewilayahan Desa, Usulan Prioritas Perencanaan Pembangunan

	Kewilayahan Kecamatan, Kamus Usulan Perencanaan PIK 2025, Kamus Usulan POKIR DPRD
--	---

#### 4.1.5 Subkegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Deskripsi	: Rapat Koordinasi dengan TAPD dan Koordinasi dengan OPD dalam rangka Penyusunan Dokumen RKPD 2024, Dokumen P RKPD Tahun 2024, Dokumen Renstra, Dokumen Usulan DAK, Dokumen Renja PD Tahun 2024, Dokumen Perubahan Renja Tahun 2023, dan penyusunan Rancanagna awal RPJPD 2025-2045, serta koordinasi PPD 2023
Anggaran	: Rp1.100.601.340,00
Output	: Dokumen Ranwal RKPD, RKPD 2024, RKPDP 2023, Dokumen Renstra, Dokumen Renja 2024, Dokumen Renja P 2023, Dokumen Usulan DAK, Laporan Hasil Desk RKA per Sub Kegiatan, Forum Konsultasi Perencanaan Penganggaran, Rancangan Awal RPJPD 2025-2045

#### 4.2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

##### 4.2.1 Subkegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Deskripsi	: Koordinasi ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan
Anggaran	: Rp128.208.840,00
Output	: Buku Data Pembangunan

##### 4.2.2 Subkegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota

Deskripsi	: Penyusunan buku profil daerah
Anggaran	: Rp75.030.000,00
Output	: Buku Profil Daerah, buku Saku

#### 4.3 Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan

##### Pembangunan Daerah

##### 4.3.1 Subkegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan

##### Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Deskripsi	:	Sub kegiatan ini untuk melakukan pengendalian dan monitoring evaluasi pelaksanaan program kegiatan di kabupaten Bantul, sekaligus memenuhi laporan laporan yang bersifat mandatori.
Anggaran	:	Rp302.299.790,00
Output	:	Dokumen Evaluasi hasil RKPD, Dokumen Evaluasi hasil RPJMD, Pengendalian kebijakan penyusunan RKPD, dokumen pengendalian pelaksanaan RKPD, dokumen LKPJ, Evaluasi Kinerja PD, pemeliharaan aplikasi e-ROPK

##### 4.3.1 Subkegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala

##### Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota

Deskripsi	:	Sub kegiatan ini untuk melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan program kegiatan di kabupaten Bantul, sekaligus memenuhi laporan laporan yang bersifat mandatori.
Anggaran	:	Rp232.940.000,00
Output	:	Dokumen Evaluasi RPJPD, Laporan DAK, Laporan Evaluasi Hasil Pembangunan Daerah, konversi/pemeliharaan aplikasi e-SAKIP

#### 5. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

##### 5.1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

##### 5.1.1 Subkegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan

##### Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Deskripsi	:	Koordinasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan
Anggaran	:	Rp15.257.500,00
Output	:	Berita Acara desk renja perangkat daerah dan perubahan renja perangkat daerah mitra bidang pemerintahan

5.1.2 Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi  
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan

Deskripsi	:	Pelaksanaan sub kegiatan ini meliputi rapat internal bidang pemsosbud, Koordinasi Bersama PD mitra kerja, bimtek penyusunan RPJMDesa dan RKP Kalurahan
Anggaran	:	Rp94.453.840,00
Output	:	Rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang pemerintahan.

5.1.3 Subkegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan  
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Deskripsi	:	Koordinasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang pembangunan manusia
Anggaran	:	Rp12.325.000,00
Output	:	Berita Acara desk renja perangkat daerah dan perubahan renja perangkat daerah mitra bidang pembangunan manusia

5.1.4 Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi  
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

Deskripsi	:	Koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan bidang kesehatan, pendidikan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kebudayaan dan pemberdayaan masyarakat.
Anggaran	:	Rp400.241.520,00
Output	:	Buku TKPK, LP2KD, Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak, Laporan SDGs, Laporan Kabupaten Sehat, Laporan Germas,

5.2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber  
Daya Alam)

5.2.1 Subkegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan  
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Deskripsi	:	Koordinasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang perekonomian
-----------	---	---

Anggaran	:	Rp5.142.500,00
Output	:	Rancangan renja perangkat daerah dan perubahan renja perangkat daerah mitra bidang perekonomian

5.2.2 Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi  
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian

Deskripsi	:	Pelaksanaan dari sub kegiatan ini yaitu melakukan koordinasi harmonisasi perencanaan pembangunan bidang perekonomian.
Anggaran	:	Rp319.509.000,00
Output	:	Dokumen laporan CSR, komite ekonomi kreatif, forum CSR bantu, Kajian Analisis Ekonomi Makro dan Fiskal Kabupaten Bantul Tahun 2024

5.2.4 Subkegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan  
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA

Deskripsi	:	Koordinasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA
Anggaran	:	Rp6.332.500,00
Output	:	Rancangan renja perangkat daerah dan perubahan renja perangkat daerah mitra bidang SDA

5.2.4 Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi  
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA

Deskripsi	:	Pelaksanaan dari sub kegiatan ini yaitu melakukan koordinasi harmonisasi perencanaan pembangunan bidang SDA
Anggaran	:	Rp139.877.020,00
Output	:	Dokumen rencana tindak lanjut sinergitas dan harmonisasi kegiatan bidang SDA, RADPG, Laporan pengendalian dan evaluasi bidang SDA

5.3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

5.3.1 Subkegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan  
Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

Deskripsi	:	Koordinasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Infrastruktur
Anggaran	:	Rp5.057.500,00

Output	:	Rancangan renja perangkat daerah dan perubahan renja perangkat daerah mitra bidang Infrastruktur
--------	---	--

### 5.3.2 Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur

Deskripsi	:	Rapat Koordinasi Bersama mitra kerja (OPD BKO) serta sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang infrastruktur
Anggaran	:	Rp886.812.500,00
Output	:	Laporan Bidang Infrastruktur, Dokumen EHRA, kajian jaringan irigasi kabupaten bantul, Kajian penyusunan database perencanaan berbasis perdukuhan, identifikasi sedimentasi muara sungai opak, pantai depok kabupaten bantul 2023, Kajian besaran anggaran untuk pencapaian target air bersih dalam JAKSTRA dan RPJMD, Dokumen Jakstrada SPAM Kab. Bantul, kajian pengelolaan sanitasi kab. Bantul, kajian pengelolaan sanitasi kab. Bantul, Kajian Review RISPAM Kab. Bantul

### 5.3.3 Subkegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

Deskripsi	:	Koordinasi perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang Kewilayahan
Anggaran	:	Rp4.377.500,00
Output	:	Rancangan renja perangkat daerah dan perubahan renja perangkat daerah mitra bidang Kewilayahan

### 5.3.4 Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan

Deskripsi	:	Rapat Koordinasi Bersama mitra kerja (OPD BKO) serta sinergisitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan bidang kewilayahan.
Anggaran	:	Rp190.546.340,00
Output	:	Masterplan Pengembangan Kawasan Stasiun Kereta Api Sedayu, dan Laporan hasil perencanaan pembangunan bidang dan kewilayahan.

## 6. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

### 6.1 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan

#### Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

##### 6.1.1 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan

Deskripsi	:	Koordinasi kelitbangan dan peraturan
Anggaran	:	Rp139.901.340,00
Output	:	

##### 6.1.2 Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan

Deskripsi	:	Koordinasi evaluasi pelaksanaan peraturan, rekomendasi rencana penetapan peraturan baru
Anggaran	:	Rp63. 55.525.000,00
Output	:	Laporan evaluasi dan rekomendasi peraturan

### 6.2 Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

#### 6.2.1 Subkegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi

Deskripsi	:	Koordinasi pelaksanaan, forum kelitbangan se Propinsi DIY, inovasi,
Anggaran	:	Rp147.160.000,00
Output	:	forum kelitbangan, lomba inovasi

#### 6.2.2 Subkegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Deskripsi	:	Fasilitasi jurnal riset daerah
Anggaran	:	Rp139.357.520,00
Output	:	fasilitasi JRD,

#### 6.2.3 Subkegiatan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektua

Deskripsi	:	Fasilitasi perijinan/sertifikat HKI
Anggaran	:	Rp36.625.000,00
Output	:	Sertifikat HaKI ,

## **2.2. Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2023 juga dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yaitu tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kewajaran, serta taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja;
- c. Semua transaksi keuangan dilaksanakan melalui Bendahara Pengeluaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Semua belanja Dinas dianggarkan pada APBD, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Pengukuran indikator keberhasilan meliputi mekanisme sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan suatu program kegiatan. Secara umum kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat dilaksanakan dengan lancar dan mencapai target sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Tahun 2023 Bappeda mengampu 4 urusan, yaitu urusan pemerintahan bidang kebudayaan, urusan perencanaan, urusan sekretariat daerah (dana keistimewaan), serta urusan penelitian dan pengembangan, serta melaksanakan 6 program dengan 16 kegiatan dan 50 subkegiatan. Program yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
5. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

## 6. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.

Pencapaian target kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 dapat diuraikan melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu sebagai berikut.

CAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2023

No	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan tahun 2023	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja pada Tahun 2023 (%)	
						K	Rp	K	Rp	K	%
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	2.22.8	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Capaian Tingkat Pelestarian Situs Warisan Geologi (Geoheritage)	Persen	20	273,415,000	20	268,471,000	100	98.19
		2.22.8.1.04	Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Capaian luasan yang terkonservasi di dalam zona inti	persen	20	273,415,000	20	268,471,000	100	98.19
		2.22.8.1.04.1	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Fasilitasi Forum Warisan Geologi (Geoheritage) Kabupaten Bantul	laporan	1	273,415,000	1	268,471,000	100	98.19
		4.01.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas	Persen	100	453,541,000	100	442,321,800	100	97.53
		4.01.10.1.06	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	Persentase capaian kinerja perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan keistimewaan	Persen	100	453,541,000	100	442,321,800	100	97.53
			Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah dokumen program dan kegiatan keistimewaan yang disusun	Dokumen	4	281,830,000	4	273,017,600	100	96.87

		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Laporan	4	171,711,000	4	169,304,200	100	98.60
	X.XX.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)</b>	Angka	86	8,692,377,381	86	8,466,528,868	100	97.40
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	Persen	100	66,250,000	100	66,236,600	100	99.98
	X.XX.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	59,425,000	6	59,414,100	100	99.98
	X.XX.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	3	6,825,000	3	6,822,500	100	99.96
	X.XX.01.2.02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan</b>	Persen	100	7,349,624,981	100	7,222,092,047	100	98.26
	X.XX.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	51	7,221,664,981	51	7,094,134,547	100	
	X.XX.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	125,160,000	12	125,160,000	100	100.00
	X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	2	2,800,000	2	2,797,500	100	99.91
	X.XX.01.2.05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian</b>	Persen	100	27,975,000	100	27,700,000	100	99.02

	X.XX.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	3	27,975,000	3	27,700,000	100	99.02
	X.XX.01.2.06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>688,997,337</b>	<b>100</b>	<b>648,676,186</b>	<b>100</b>	<b>94.15</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6	4,081,935	6	4,077,100	100	99.88
	X.XX.01.2.06	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	8	216,041,652	8	203,354,000	100	-94.13
	X.XX.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	5	28,147,500	5	26,645,100	100	94.66
	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	29,095,250	4	29,094,450	100	100.00
	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	2	2,400,000	2	2,040,000	100	85.00
	X.XX.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	24	12,500,000	24	12,490,000	160	99.92
	X.XX.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	228	387,731,000	228	362,393,036	156.164	93.47
	X.XX.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2	4,000,000	2	3,870,000	100	96.75
	X.XX.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	5,000,000	1	4,712,500	100	94.25

	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	239,208,600	100	214,240,017	100	89.56
	X.XX.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	2	300,000	2	271,000	100	90.33
	X.XX.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12,000,000	12	7,306,120	100	60.88
	X.XX.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	laporan	2	65,140,000	2	56,260,000	100	86.37
	X.XX.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	161,768,600	12	150,402,897	100	92.97
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	320,321,463	100	287,584,018	100	89.78
	X.XX.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	30	191,122,600	30	158,790,018	100	83.08
	X.XX.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	129,198,863	1	128,794,000	100	99.69
	5.01.2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian substansi evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah tahunan (RKPD)	Persen	100	1,867,448,810	100	1,870,983,192	100	99.13

				Persentase indikator sasaran Renstra Perangkat Daerah yang mencapai predikat Tinggi dan sangat tinggi	Persen	100		100		100	
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase Hasil Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah Ditetapkan dengan Perkada/Perda	Persen	100	1,250,685,180	100	1,237,187,612	100	98.92
		5.01.02.2.01.3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	46,287,500	1	43,270,000	100	93.48
		5.01.02.2.01.4	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	7,942,500	1	7,942,500	100	100.00
		5.01.02.2.01.5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	27,692,500	1	27,565,000	100	99.54
		5.01.02.2.01.6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	75	68,161,340	75	67,158,806	100	98.53
		5.01.02.2.01.7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	5	1,100,601,340	5	1,091,251,306	100	99.15
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Perencanaan	Persen	100	203,238,840	100	202,234,410	100	99.51
		5.01.02.2.02.1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Masukan	1	128,208,840	1	127,204,410	100	99.22

	5.01.02.2.02.3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku	3	75,030,000	3	75,030,000	100	100.00
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Dokumen Perangkat Daerah yang Dikendalikan dan Dievaluasi	Persen	100	433,524,790	100	431,561,170	100	99.55
	5.01.02.2.03.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	laporan	3	302,299,790	3	300,614,070	100	99.44
	5.01.02.2.03.3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	laporan	8	131,225,000	8	130,947,100	100	99.79
	5.01.03	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	100	2,079,932,720	100	2,033,788,313	100	97.78
			Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang perekonomian dan SDA	Persen	100		100			
			Persentase kesesuaian sub kegiatan Renja PD dengan Rensta PD bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	100		100			
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	522,277,860	100	506,178,924	100	96.92

	5.01.03.2.01.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	29	15,257,500	29	14,665,000	100	96.12
	5.01.03.2.01.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	laporan	1	94,453,840	1	93,771,302	100	99.28
	5.01.03.2.01.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	Perangkat Daerah	11	12,325,000	11	12,290,000	100	99.72
	5.01.03.2.01.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	400,241,520	1	385,452,622	100	96.31
	5.01.03.2.02	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Cakupan dokumen perencanaan pada bidang Perekonomian dan SDA</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>470,861,020</b>	<b>100</b>	<b>460,006,909</b>	<b>100</b>	<b>97.69</b>
	5.01.03.2.02.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	Perangkat Daerah	4	5,142,500	4	4,850,000	100	94.31
	5.01.03.2.02.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	3	319,509,000	3	312,936,500	100	97.94

			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	Perangkat Daerah	4	6,332,500	4	6,115,000	100	96.57
		5.01.03.2.02.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan	1	139,877,020	1	136,105,409	100	97.30
		5.01.03.2.03	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Cakupan Dokumen Perencanaan Pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>1,086,793,840</b>	<b>100</b>	<b>1,067,602,480</b>	<b>100</b>	<b>98.23</b>
		5.01.03.2.03.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	Perangkat Daerah	2	5,057,500	2	4,437,500	100	87.74
		5.01.03.2.03.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	1	886,812,500	1	871,293,175	100	98.25
		5.01.03.2.03.6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	Perangkat Daerah	4	4,377,500	4	3,837,500	100	87.66
		5.01.03.2.03.8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	1	190,546,340	1	188,034,305	100	98.68

2.	Meningkatnya penerapan penelitian dan pengembangan dalam pembangunan	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan Road Map SIDA	Persen	100	518,569,860	100	502,739,459	100	96.95
		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang sesuai dengan road map SIDA	Persen	100	195,426,340	100	193,260,260	100	98.89
		5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	2	139,901,340	2	138,242,760	100	98.81
		5.05.02.2.01.12	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi	2	55,525,000	2	55,017,500	100	99.09
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Kegiatan pada Road Map SIDA yang Terlaksana	Persen	100	323,143,520	100	309,479,199	100	95.77
		5.05.02.2.04.1	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	1	147,160,000	1	143,845,000	100	97.75
		5.05.02.2.04.4	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan	1	139,358,520	1	133,829,199	100	96.03
		5.05.02.2.04.5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	1	36,625,000	1	31,805,000	100	86.84
			Jumlah				13,905,284,771		13,584,832,632		97.70

### BAB III

#### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

##### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian target kinerja keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Pendapatan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bukan merupakan OPD penghasil sehingga tidak ada sajian pendapatan.

b. Belanja

No	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi	Lebih / (Kurang)	
				(Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	13.781.033.771,00	13.474.772.633,10	(306.261.137,90)	97,78
5.1.01	Belanja Pegawai	7.360.224.981,00	7.232.044.547,00	(128.180.434,00)	98,26
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	6.420.808.790,00	6.242.728.086,10	(178.080.703,90)	97,23
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	124.250.000,00	110.060.000,00	(14.190.000,00)	88,58
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.250.000,00	110.060.000,00	(14.190.000,00)	88,58
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	13.905.283.771,00	13.584.832.633,10	(320.451.137,90)	97,70

Komposisi anggaran belanja dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:

1. Belanja Operasi, anggaran sebesar Rp13.781.033.771,00 terealisasi sebesar Rp13.474.772.633,10 atau 97,78%

Belanja Operasi meliputi:

- 1.1. Belanja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp7.360.224.981,00 terealisasi sebesar Rp7.232.044.547,00 atau 98,26%

Belanja pegawai terdiri dari:

- Belanja Gaji dan tunjangan, dengan anggaran sebesar Rp7.221.664.981,00 terealisasi sebesar Rp7.094.134.547,00 atau 98,23%

- Belanja Honorarium, dengan anggaran sebesar Rp138.560.000,00 terealisasi sebesar Rp137.910.000,00 atau 99,53%

1.2. Belanja Barang dan Jasa, dengan anggaran sebesar Rp6.420.808.790,00 terealisasi Rp6.242.728.085,10 atau 97,23%

2. Belanja Modal, berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan anggaran sebesar Rp124.250.000,00 terealisasi Rp110.060.000,00 atau 88,58%.

Adapun capaian realisasi keuangan per program, kegiatan, dan subkegiatan sebagai berikut:

**REALISASI/CAPAIAN ANGGARAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

KODE REKENING	URAIAN	Jumlah (Rp)		Lebih / (Kurang) (Rp)	%
		Pagu Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>				
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	273.415.000,00	268.471.000,00	(4.944.000,00)	98,19
2.22.08.5.02	PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN WARISAN BUDAYA	273.415.000,00	268.471.000,00	(4.944.000,00)	98,19
2.22.08.5.02.01	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	273.415.000,00	268.471.000,00	(4.944.000,00)	98,19
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	453.541.000,00	442.321.800,00	(11.219.200,00)	97,53
4.01.04.5.06	PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN KEISTIMEWAAN	453.541.000,00	442.321.800,00	(11.219.200,00)	97,53
4.01.04.5.06.01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	281.830.000,00	273.017.600,00	(8.812.400,00)	96,87
4.01.04.5.06.02	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	171.711.000,00	169.304.200,00	(2.406.800,00)	98,60
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	8.692.377.381,00	8.466.528.868,50	(225.848.512,50)	97,40
5.01.01.2.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASIKINERJA PERANGKAT DAERAH	66.250.000,00	66.236.600,00	(13.400,00)	99,98
5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	59.425.000,00	59.414.100,00	(10.900,00)	99,98

5.01.01.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.825.000,00	6.822.500,00	(2.500,00)	99,96
<b>5.01.01.2.02</b>	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	7.349.624.981,00	7.222.092.047,00	(127.532.934,00)	98,26
5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.221.664.981,00	7.094.134.547,00	(127.530.434,00)	98,23
5.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	125.160.000,00	125.160.000,00	0,00	100,00
5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.800.000,00	2.797.500,00	(2.500,00)	99,91
<b>5.01.01.2.05</b>	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	27.975.000,00	27.700.000,00	(275.000,00)	99,02
5.01.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	27.975.000,00	27.700.000,00	(275.000,00)	99,02
<b>5.01.01.2.06</b>	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	688.997.337,00	648.676.186,50	(40.321.150,50)	94,15
5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.081.935,00	4.077.100,00	(4.835,00)	99,88
5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	216.041.652,00	203.354.000,00	(12.687.652,00)	94,13
5.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.147.500,00	26.645.100,00	(1.502.400,00)	94,66
5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	29.095.250,00	29.094.450,00	(800,00)	100,00
5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000,00	2.040.000,00	(360.000,00)	85,00
5.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	12.500.000,00	12.490.000,00	(10.000,00)	99,92
5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	387.731.000,00	362.393.036,50	(25.337.963,50)	93,47
5.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.000.000,00	3.870.000,00	(130.000,00)	96,75
5.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.000.000,00	4.712.500,00	(287.500,00)	94,25
<b>5.01.01.2.08</b>	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	239.208.600,00	214.240.017,00	(24.968.583,00)	89,56
5.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	300.000,00	271.000,00	(29.000,00)	90,33
5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.000.000,00	7.306.120,00	(4.693.880,00)	60,88
5.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	65.140.000,00	56.260.000,00	(8.880.000,00)	86,37
5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	161.768.600,00	150.402.897,00	(11.365.703,00)	92,97
<b>5.01.01.2.09</b>	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	320.321.463,00	287.584.018,00	(32.737.445,00)	89,78
5.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	191.122.600,00	158.790.018,00	(32.332.582,00)	83,08
5.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	129.198.863,00	128.794.000,00	(404.863,00)	99,69
<b>5.01.02</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>	1.887.448.810,00	1.870.983.192,50	(16.465.617,50)	99,13
<b>5.01.02.2.01</b>	<b>PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENDANAAN</b>	1.250.685.180,00	1.237.187.612,20	(13.497.567,80)	98,92
5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	46.287.500,00	43.270.000,00	(3.017.500,00)	93,48
5.01.02.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	7.942.500,00	7.942.500,00	0,00	100,00
5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	27.692.500,00	27.565.000,00	(127.500,00)	99,54
5.01.02.2.01.06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	68.161.340,00	67.158.806,10	(1.002.533,90)	98,53
5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1.100.601.340,00	1.091.251.306,10	(9.350.033,90)	99,15

<b>5.01.02.2.02</b>	<b>ANALISIS DATA DAN INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	203.238.840,00	202.234.410,10	(1.004.429,90)	99,51
5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	128.208.840,00	127.204.410,10	(1.004.429,90)	99,22
5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	75.030.000,00	75.030.000,00	0,00	100,00
<b>5.01.02.2.03</b>	<b>PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	433.524.790,00	431.561.170,20	(1.963.619,80)	99,55
5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	302.299.790,00	300.614.070,20	(1.685.719,80)	99,44
5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	131.225.000,00	130.947.100,00	(277.900,00)	99,79
<b>5.01.03</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	2.079.932.720,00	2.033.788.313,00	(46.144.407,00)	97,78
<b>5.01.03.2.01</b>	<b>KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA</b>	522.277.860,00	506.178.923,60	(16.098.936,40)	96,92
5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	15.257.500,00	14.665.000,00	(592.500,00)	96,12
5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	94.453.840,00	93.771.301,70	(682.538,30)	99,28
5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	12.325.000,00	12.290.000,00	(35.000,00)	99,72
5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	400.241.520,00	385.452.621,90	(14.788.898,10)	96,31
<b>5.01.03.2.02</b>	<b>KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA (SUMBER DAYA ALAM)</b>	470.861.020,00	460.006.909,20	(10.854.110,80)	97,69
5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5.142.500,00	4.850.000,00	(292.500,00)	94,31
5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	319.509.000,00	312.936.500,00	(6.572.500,00)	97,94
5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	6.332.500,00	6.115.000,00	(217.500,00)	96,57
5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	139.877.020,00	136.105.409,20	(3.771.610,80)	97,30
<b>5.01.03.2.03</b>	<b>KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN</b>	1.086.793.840,00	1.067.602.480,20	(19.191.359,80)	98,23
5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5.057.500,00	4.437.500,00	(620.000,00)	87,74
5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	886.812.500,00	871.293.175,00	(15.519.325,00)	98,25
5.01.03.2.03.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	4.377.500,00	3.837.500,00	(540.000,00)	87,66
5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	190.546.340,00	188.034.305,20	(2.512.034,80)	98,68

5.05.02	<b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>	<b>518.568.860,00</b>	<b>502.739.459,10</b>	<b>(15.829.400,90)</b>	<b>96,95</b>
5.05.02.2.01	<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN</b>	195.426.340,00	193.260.260,10	(2.166.079,90)	98,89
5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	139.901.340,00	138.242.760,10	(1.658.579,90)	98,81
5.05.02.2.01.13	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi terhadap Pelaksanaan Peraturan	55.525.000,00	55.017.500,00	(507.500,00)	99,09
5.05.02.2.04	<b>PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI</b>	323.142.520,00	309.479.199,00	(13.663.321,00)	95,77
5.05.02.2.04.01	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	147.160.000,00	143.845.000,00	(3.315.000,00)	97,75
5.05.02.2.04.04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	139.357.520,00	133.829.199,00	(5.528.321,00)	96,03
5.05.02.2.04.05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	36.625.000,00	31.805.000,00	(4.820.000,00)	86,84
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	13.905.283.771,00	13.584.832.633,10	(320.451.137,90)	97,70

### 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target

Berdasarkan realisasi anggaran pendapatan dan belanja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sampai dengan akhir tahun 2023 menunjukkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan secara keseluruhan tidak ada hambatan yang berarti.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

#### **4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan operasional, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Sedangkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Bantul merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya kepada entitas pelaporan.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut.

##### **4.3.1 Kas**

Kas di bendahara pengeluaran merupakan kas yang masih dikelola dan menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal 31 Desember. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang kertas, uang logam dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada bendahara pengeluaran/pemegang kas per tanggal 31 Desember. Kas dicatat sebesar nilai nominal dan dinyatakan dalam nilai rupiah.

##### **4.3.2 Persediaan**

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan

operasional OPD dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dimanfaatkan dalam rangka pelayanan masyarakat.

Persediaan antara lain, terdiri atas

- Bahan bakar minyak dan pelumas
- alat tulis kantor,
- kertas dan cover
- bahan cetak,
- benda pos,
- bahan komputer,
- perabot kantor,
- alat listrik,
- sovenir/cendera mata,
- alat/bahan untuk kegiatan lain, dan
- obat-obatan lainnya
- natura.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh OPD dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarsasi fisik (*stock opname*).

#### 4.3.3 Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah penanaman dana untuk jangka waktu lebih dari satu tahun, pada umumnya jauh lebih lama dari itu, dengan tujuan untuk memberikan penghasilan tetap. Sesuai dengan Tugas pokok dan fungsinya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bukan OPD pengelola Investasi.

#### 4.3.4 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset yang berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Klasifikasi aset tetap adalah

- tanah,
- peralatan dan mesin,
- gedung dan bangunan,
- jalan, irigasi, dan jaringan,

- aset tetap lainnya, .
- konstruksi dalam pengerjaan, dan
- akumulasi penyusutan.

#### 4.3.5 Aset lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri atas

- tagihan piutang penjualan angsuran,
- tagihan tuntutan ganti kerugian daerah,
- kemitraan dengan pihak ketiga,
- aset tak berwujud,
- aset tetap lain-lain,
- aset lain yang dibatasi penggunaannya, dan
- akumulasi amortisasi aset tak berwujud.

#### 4.3.6 Kewajiban Jangka Panjang

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bukan OPD pengelola Dana Investasi

#### 4.3.7 Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana terdiri atas

- Ekuitas Dana Lancar, yaitu selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan pengelola barang persediaan.
- Ekuitas Dana Investasi (EDI) merupakan selisih antara jumlah investasi permanen, aset tetap, aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan) dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang. EDI meliputi dana yang diinvestasikan dalam Investasi Permanen, diinvestasikan dalam aset tetap, diinvestasikan dalam aset lainnya, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Mencerminkan kekayaan pemerintah

Kab. Bantul dalam hal ini Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berupa, aset tetap, dan aset lainnya,

- Ekuitas Dana Cadangan merupakan ekuitas dana yang telah dicadangkan untuk tujuan tertentu. Rekening ini merupakan pasangan rekening dana cadangan. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta aturan perundang-undangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tidak dibenarkan menganggarkan Dana Cadangan.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS POS LAPORAN KEUANGAN OPD**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 189, laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pemerintah terdiri atas

- a. Laporan Realisasi Anggaran,
- b. Neraca,
- c. Laporan Operasional,
- d. Laporan Perubahan Ekuitas, dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan realisasi APBD merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar, sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat perbandingan antara realisasi pelaksanaan DPA dengan rencana yang tertuang dalam APBD, yaitu dengan menghitung selisih antara realisasi Anggaran dengan, realisasi belanja pada pos-pos pembiayaan.

Pada tahun anggaran 2023 struktur DPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah hanya meliputi komponen belanja. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah bukan merupakan salah satu OPD penghasil pendapatan, sehingga tidak memberi kontribusi terhadap pendapatan Daerah Kabupaten Bantul.

Dalam rangka memberi gambaran secara umum mengenai penjelasan laporan realisasi APBD pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut.

**5.1 Perincian dan Penjelasan Pos Pos Realisasi Anggaran Belanja**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2023

No	Uraian	Pagu Anggaran (Rp.)	Jumlah Realisasi (Rp.)	Lebih / (Kurang) (Rp.)	%
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	13.781.033.771,00	13.474.772.633,10	(306.261.137,90)	97,78
5.1.1	Belanja Pegawai	7.360.224.981,00	7.232.044.547,00	(128.180.434,00)	98,26
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.420.808.790,00	6.242.728.086,10	(178.080.703,90)	97,23

<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	124.250.000,00	110.060.000,00	(14.190.000,00)	88,58
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.250.000,00	110.060.000,00	(14.190.000,00)	88,58
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	13.905.283.771,00	13.584.832.633,10	(320.451.137,90)	97,70
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(13.905.283.771,00)	(13.584.832.633,10)	320.451.137,90	97,70
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	(13.905.283.771,00)	(13.584.832.633,10)	320.451.137,90	97,70

1. Belanja Operasi, anggaran sebesar Rp13.781.033.771,00 terealisasi sebesar Rp13.474.772.633,10 atau 97,78%

Belanja Operasi meliputi:

- a. Belanja Pegawai dengan anggaran sebesar Rp7.360.224.981,00 terrealisasi sebesar Rp7.232.044.547,00 atau 98,26%

Belanja pegawai terdiri dari:

- Belanja Gaji dan tunjangan, dengan anggaran sebesar Rp7.221.664.981,00 terealisasi sebesar Rp7.094.134.547,00 atau 98,23%
- Belanja Honorarium, dengan anggaran sebesar Rp138.560.000,00 terealisasi sebesar Rp137.910.000,00 atau 99,53%

- b. Belanja Barang dan Jasa, dengan anggaran sebesar Rp6.420.808.790,00 terealisasi Rp6.242.728.086,10 atau 97,23%

2. Belanja Modal, berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan anggaran sebesar Rp124.250.000,00 terealisasi Rp110.060.000,00 atau 88,58%.

## 5.2. Perincian dan Penjelasan Pos Pos Neraca

Neraca Badan Perencanaan Pembangunan Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022.

No	Uraian	Jumlah	
		2023	2022
1	ASET		
11	ASET LANCAR		
111	Kas dan Setara Kas	0,00	0,00
113	Piutang	0,00	0,00
114	Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00
115	Piutang Lainnya (Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat)	0,00	0,00
116	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00
117	Piutang Lain-lain	0,00	0,00
119	Persediaan	16.189.800,00	23.934.350,00
11901	Persediaan	16.189.800,00	23.934.350,00
	<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>16.189.800,00</b>	<b>23.934.350,00</b>
13	ASET TETAP		
131	Tanah	0,00	0,00
132	Peralatan dan Mesin	6.079.672.864,00	6.264.341.021,00
133	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
134	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
135	Aset Tetap Lainnya	12.000.670,00	12.000.670,00
136	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
137	Akumulasi Penyusutan	(5.528.247.278,33)	(5.447.385.161,38)
	<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>563.426.255,67</b>	<b>828.956.529,62</b>
15	ASET LAINNYA		
153	Aset Tak Berwujud	237.435.000,00	807.718.340,00
15301	Aset Tak Berwujud	3.180.056.700,00	3.180.056.700,00
15306	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.942.621.700,00)	(2.372.338.360,00)
154	Aset Lain-lain	0,00	0,00
155	Aset Lain Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
	<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>237.435.000,00</b>	<b>807.718.340,00</b>
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>817.051.055,67</b>	<b>1.660.609.219,62</b>
2	KEWAJIBAN		
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
215	Utang Belanja	0,00	0,00
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3	EKUITAS		

31	EKUITAS		
311	Ekuitas	817.051.055,67	1.660.609.219,62
	JUMLAH EKUITAS	817.051.055,67	1.660.609.219,62
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	817.051.055,67	1.660.609.219,62

### 5.2.1. Aset

No	Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
1.	Aset Lancar	16.189.800,00	23.934.350,00
2.	Aset tetap - Akumulasi Penyusutan	6.091.673.534,00 (5.528.247.278,33)	6.276.341.691,00 (5.447.385.161,38)
3.	Aset lainnya (Aset Tak Berwujud) - Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	3.180.056.700,00 (2.942.621.700,00)	3.180.056.700,00 (2.372.338.360,00)
	JUMLAH	817.051.055,67	1.660.609.219,62

#### 5.2.1.1. Aset Lancar

##### 1. Kas di bendahara pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nol rupiah)

##### 2. Persediaan

Persediaan merupakan bagian dari aset lancar. Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.189.800,00 (Enam belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) dalam bentuk persediaan barang pakai habis yang berupa

- |   |                    |
|---|--------------------|
| a. alat tulis kantor                        | = Rp. 8.774.900,00 |
| b. bahan cetak                              | = Rp. 2.559.000,00 |
| c. bahan komputer                           | = Rp. 2.493.800,00 |
| d. alat listrik                             | = Rp. 436.400,00   |
| e. alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya | = Rp. 1.826.700,00 |
| f. obat-obatan lainnya                      | = Rp. 99.000,00    |

Persediaan yang dicatat oleh Penyimpan Barang hanya persediaan yang digunakan untuk kebutuhan operasional internal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Penambahan dan pengurangan bahan persediaan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**Penambahan dan Pengurangan Persediaan Tahun 2023**

No	Nama Barang	Saldo Awal 2022	Penerimaan 2022	Pengeluaran 2022	Saldo Akhir 2022
1	Bahan Bakar Minyak & Pelumas	-	98,653,638.00	98,653,638.00	-
2	Alat Tulis Kantor	4,355,900.00	275,123,500.00	270,704,500.00	8,774,900.00
3	Kertas dan cover		40,300.00	40,300.00	-
4	Bahan Cetak	84,000.00	179,104,200.00	176,629,200.00	2,559,000.00
5	Benda Pos	-	3,330,000.00	3,330,000.00	
6	Bahan Komputer	2,912,800.00	29,085,800.00	29,504,800.00	2,493,800.00
7	Perabot Kantor	12,600,250.00		12,600,250.00	-
8	Alat Listrik	644,400.00	4,106,100.00	4,314,100.00	436,400.00
9	Suvenir/Cenderamata	1,400,000.00	8,700,000.00	10,100,000.00	-
10	Alat/Bahan untuk kegiatan kantor lainnya	1,238,000.00	26,650,300.00	26,061,600.00	1,826,700.00
11	Obat-Obatan Lainnya	699,000.00		600,000.00	99,000.00
12	Natura	-	1,664,227,500.00	1,664,227,500.00	-
<b>TOTAL</b>		<b>23,934,350.00</b>	<b>2,289,021,338.00</b>	<b>2,296,765,888.00</b>	<b>16,189,800.00</b>

Jumlah Aset Lancar sebesar Rp16.189.800,00 (Enam belas tiga juta seratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh rupiah).

**5.2.1.2. Aset Tetap**

1. Tanah

Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

2. Peralatan dan mesin

Uraian	Jumlah (Rp)
- Nilai Peralatan dan Mesin per 1 Januari 2023	6.275.300.785,00
- Penambahan dari Belanja Modal 2023	122.972.500,00
- Penambahan dari Dropping/Pemberian yang Sah	0,00
- Pengurangan dalam tahun 2023 (mutasi/hapus)	307.380.657,00
<b>Jumlah</b>	<b>6.090.892.628,00</b>

Peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.090.892.628,00 yang dicatat pengurus barang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan nilai peralatan dan mesin yang menjadi aset Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Sedangkan dalam neraca per 31 Desember 2023 jumlah Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.079.672.864,00, sehingga terdapat perbedaan pencatatan sebesar Rp11.219.764,00. Perbedaan ini karena adanya perbedaan metode pencatatan. Pencatatan di Neraca tidak mencantumkan nilai aset yang dibawah Rp300.000,00.

Penambahan Belanja Modal Perlengkapan dan Mesin tahun 2023 sebesar Rp122.972.500,00 meliputi:

- belanja modal pengadaan peralatan dan mesin sebesar Rp110.060.000,00 yang terdiri dari:
  - belanja di atas Rp300.000,00 sebesar Rp109.560.500,00
  - belanja di bawah Rp300.000,00 sebesar Rp500.000,00
- dropping/pemberian yang sah sebesar Rp12.912.500,00, berupa:
  - 1 unit notebook Rp12.912.500,00 (Berita Acara Serah Terima Nomor: 028/B/00004/BPKPAD tanggal 1 Maret 2023).

Sedangkan pengurangan peralatan dan mesin sebesar Rp307.380.657,00 berupa:

- mutasi ke Pengelola BMD (Sekretaris Daerah) sebanyak 1 unit Brankas, dan 3 unit laptop (netbook/notebook) sebesar Rp20.468.000,00 dengan Berita Acara Serah Terima Nomor 020/00214/Sekretariat/2023 tanggal 20 Januari 2023
- Mutasi ke Pengelola BMD (Sekretaris Daerah) sebanyak 2 unit partisi (reklas KIB C ke KIB B koreksi BPK) sebesar Rp109.976.400,00 dan mutasi 5 unit meja kerja, 4 unit lemari buku, 1 unit filling kabinet, dan 1 unit lemari kayu sebesar Rp27.360.201,00, dengan Berita Acara Serah Terima Nomor B/000.2.3.2/0001/Sekretariat.2023
- penghapusan BMD berupa peralatan dan mesin sebanyak 20 unit sebesar Rp149.576.056,00 dengan keputusan Bupati No.403 tahun 2023 tanggal 11 September 2023

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

4. Jalan, irigasi dan jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

5. Aset tetap lainnya

Uraian	Jumlah (Rp)
- Nilai aset tetap lainnya per 1 Januari 2023	12.000.670,00
- Penambahan dari Belanja Modal tahun 2023	0,00
- Penambahan dari Hibah/Pemberian yang Sah	0,00
- Pengurangan dalam tahun 2023	0,00
Jumlah	12.000.670,00

Aset tetap lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.000.670,00 (Dua belas juta enam ratus tujuh puluh rupiah) terdiri dari buku-buku referensi dan perundang-undangan.

6. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Kontruksi dalam pengerjaan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Akumulasi Penyusutan Aset tetap sebesar Rp5.528.247.278,33. Dengan demikian jumlah Aset Tetap sebesar Rp563.426.255,67.

**5.2.1.3. Aset Lainnya**

1. Aset Tak Berwujud

Uraian	Jumlah (Rp)
- Nilai aset lainnya (aset tak berwujud) per 1 Januari 2023	3.180.056.700,00
- Penambahan dalam tahun 2023	0,00
- Pengurangan dalam tahun 2023	0,00
Jumlah	3.180.056.700,00

Aset lainnya (aset tak berwujud) per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.180.056.700,00

Akumulasi Amortisasi Penyusutan Aset Tak Berwujud sebesar Rp2.942.621.700,00. Dengan demikian jumlah Aset Lainnya sebesar Rp237.435.000,00.

Sehingga secara keseluruhan Jumlah Aset yang tercatat di Neraca Badan Perencanaan Pembangunan Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp817.051.055,67

### **5.2.2. Ekuitas Dana**

Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp817.051.055,67.

**BAB VI**  
**INFORMASI NON KEUANGAN**

6.1 Bentuk hukum pemerintah Kabupaten Bantul

- Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Dasar hukum pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 174 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul.

6.2 Kegiatan Operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul antara lain mengacu pada

- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 81 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul;
- Peraturan Bupati Nomor 129 Tahun 2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2023 tanggal 26 Oktober 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023

- DPA BAPPEDA Nomor: DPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023 Tanggal 2 Januari 2023
- DPPA Bappeda Nomor: DPPA/B.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 26 Oktober 2023
- DPPA Bappeda Nomor: DPPA/B.2/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2023 tanggal 17 Nopember 2023

## BAB VII PENUTUP

Laporan CaLK ini disusun berdasarkan sistem pengendalian internal terhadap pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Pengawasan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan pemeriksaan berkala maupun sewaktu-waktu agar pelaksanaan kegiatan mencapai sasaran yang ditetapkan secara efisien dan efektif berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Badan Perencanaan Pembangunan, yang merupakan penjelasan dan informasi keuangan Tahun 2023. Bilamana masih ada hal-hal penting lain yang belum masuk dalam laporan ini, akan diadakan perubahan atau tambahan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari buku laporan ini.

Bantul, Januari 2024

Kepala, *3/*



Ir. Fenty Yusdayati, M.T

NIP. 196704031994032008





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**UNIT INDUK**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

PERIODE : 01 Januari 2023 s/d 31 Desember 2023

HAL: 1 / 3

No	Uraian	Tahun 2023
1	2	3
<b>8</b>	<b>BEBAN DAERAH</b>	
<b>8.1</b>	<b>BEBAN OPERASI</b>	<b>14.428.222.328,72</b>
<b>8.1.01</b>	<b>Beban Pegawai</b>	<b>7.232.044.547,00</b>
<b>8.1.01.01</b>	<b>Beban Gaji dan Tunjangan ASN</b>	<b>3.619.845.224,00</b>
<b>8.1.01.01.01</b>	<b>Beban Gaji Pokok ASN</b>	<b>2.570.017.900,00</b>
8.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	2.570.017.900,00
<b>8.1.01.01.02</b>	<b>Beban Tunjangan Keluarga ASN</b>	<b>247.030.802,00</b>
8.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	247.030.802,00
<b>8.1.01.01.03</b>	<b>Beban Tunjangan Jabatan ASN</b>	<b>129.710.000,00</b>
8.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	129.710.000,00
<b>8.1.01.01.04</b>	<b>Beban Tunjangan Fungsional ASN</b>	<b>204.735.000,00</b>
8.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	204.735.000,00
<b>8.1.01.01.05</b>	<b>Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN</b>	<b>53.355.000,00</b>
8.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	53.355.000,00
<b>8.1.01.01.06</b>	<b>Beban Tunjangan Beras ASN</b>	<b>149.112.780,00</b>
8.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	149.112.780,00
<b>8.1.01.01.07</b>	<b>Beban Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus ASN</b>	<b>23.502.425,00</b>
8.1.01.01.07.0001	Beban Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus PNS	23.502.425,00
<b>8.1.01.01.08</b>	<b>Beban Pembulatan Gaji ASN</b>	<b>37.860,00</b>
8.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	37.860,00
<b>8.1.01.01.09</b>	<b>Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN</b>	<b>221.362.752,00</b>
8.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	221.362.752,00
<b>8.1.01.01.10</b>	<b>Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN</b>	<b>5.245.156,00</b>
8.1.01.01.10.0001	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	5.245.156,00
<b>8.1.01.01.11</b>	<b>Beban Iuran Jaminan Kematian ASN</b>	<b>15.735.549,00</b>
8.1.01.01.11.0001	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	15.735.549,00
<b>8.1.01.02</b>	<b>Beban Tambahan Penghasilan ASN</b>	<b>3.474.289.323,00</b>
<b>8.1.01.02.05</b>	<b>Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN</b>	<b>3.474.289.323,00</b>
8.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.474.289.323,00
<b>8.1.01.03</b>	<b>Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b>	<b>137.910.000,00</b>
<b>8.1.01.03.07</b>	<b>Beban Honorarium</b>	<b>137.910.000,00</b>
8.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	125.160.000,00
8.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang / Jasa	12.750.000,00
<b>8.1.02</b>	<b>Beban Barang dan Jasa</b>	<b>6.242.728.086,10</b>
<b>8.1.02.01</b>	<b>Beban Barang</b>	<b>2.289.844.338,00</b>
<b>8.1.02.01.01</b>	<b>Beban Barang Pakai Habis</b>	<b>2.289.844.338,00</b>
8.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	99.476.638,00
8.1.02.01.01.0024	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	365.898.050,00

No	Uraian	Tahun 2023
1	2	3
8.1.02.01.01.0025	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	40.300,00
8.1.02.01.01.0026	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	89.363.850,00
8.1.02.01.01.0027	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.330.000,00
8.1.02.01.01.0029	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	29.085.800,00
8.1.02.01.01.0031	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.077.100,00
8.1.02.01.01.0035	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir / Cendera Mata	8.700.000,00
8.1.02.01.01.0036	Beban Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	25.645.100,00
8.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	929.977.500,00
8.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	12.490.000,00
8.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	721.760.000,00
<b>8.1.02.02</b>	<b>Beban Jasa</b>	<b>3.195.922.131,60</b>
<b>8.1.02.02.01</b>	<b>Beban Jasa Kantor</b>	<b>2.130.875.120,00</b>
8.1.02.02.01.0003	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	234.350.000,00
8.1.02.02.01.0004	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	848.280.000,00
8.1.02.02.01.0028	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	495.214.500,00
8.1.02.02.01.0029	Beban Jasa Tenaga Ahli	356.400.000,00
8.1.02.02.01.0037	Beban Jasa Juri Perlombaan / Pertandingan	6.000.000,00
8.1.02.02.01.0039	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	50.400.000,00
8.1.02.02.01.0046	Beban Jasa Konversi Aplikasi / Sistem Informasi	74.769.600,00
8.1.02.02.01.0055	Beban Jasa Iklan / Reklame, Film, dan Pemetretan	34.980.000,00
8.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	1.545.220,00
8.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal / Surat Kabar / Majalah	2.040.000,00
8.1.02.02.01.0063	Beban Kawat / Faksimili / Internet / TV Berlangganan	5.760.900,00
8.1.02.02.01.0064	Beban Paket / Pengiriman	271.000,00
8.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	20.863.900,00
<b>8.1.02.02.02</b>	<b>Beban luran Jaminan / Asuransi</b>	<b>10.347.486,60</b>
8.1.02.02.02.0005	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	7.852.501,20
8.1.02.02.02.0006	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.108.882,40
8.1.02.02.02.0007	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.386.103,00
<b>8.1.02.02.04</b>	<b>Beban Sewa Peralatan dan Mesin</b>	<b>29.300.000,00</b>
8.1.02.02.04.0036	Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	24.800.000,00
8.1.02.02.04.0117	Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	4.500.000,00
<b>8.1.02.02.05</b>	<b>Beban Sewa Gedung dan Bangunan</b>	<b>12.000.000,00</b>
8.1.02.02.05.0009	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	12.000.000,00
<b>8.1.02.02.09</b>	<b>Beban Jasa Konsultansi Konstruksi</b>	<b>1.013.399.525,00</b>
8.1.02.02.09.0012	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	1.013.399.525,00
<b>8.1.02.03</b>	<b>Beban Pemeliharaan</b>	<b>233.003.480,00</b>
<b>8.1.02.03.02</b>	<b>Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</b>	<b>104.909.480,00</b>
8.1.02.03.02.0036	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	37.519.480,00
8.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	11.130.000,00
8.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	6.930.000,00

No	Uraian	Tahun 2023
1	2	3
8.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	14.302.500,00
8.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	23.445.000,00
8.1.02.03.02.0406	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	11.582.500,00
<b>8.1.02.03.03</b>	<b>Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</b>	<b>128.094.000,00</b>
8.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	128.094.000,00
<b>8.1.02.04</b>	<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>504.108.136,50</b>
<b>8.1.02.04.01</b>	<b>Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah</b>	<b>504.108.136,50</b>
8.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	271.733.136,50
8.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	232.375.000,00
<b>8.1.02.05</b>	<b>Beban Uang dan / atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat</b>	<b>19.850.000,00</b>
<b>8.1.02.05.01</b>	<b>Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga / Pihak Lain / Masyarakat</b>	<b>19.850.000,00</b>
8.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	19.850.000,00
<b>8.1.08</b>	<b>Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>953.449.695,62</b>
<b>8.1.08.01</b>	<b>Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin</b>	<b>383.166.355,62</b>
<b>8.1.08.01.02</b>	<b>Beban Penyusutan Alat Angkutan</b>	<b>383.166.355,62</b>
8.1.08.01.02.0002	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	383.166.355,62
<b>8.1.08.06</b>	<b>Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud</b>	<b>570.283.340,00</b>
<b>8.1.08.06.01</b>	<b>Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud</b>	<b>570.283.340,00</b>
8.1.08.06.01.0005	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	570.283.340,00
	<b>JUMLAH BEBAN DAERAH</b>	<b>14.428.222.328,72</b>
	<b>SURPLUS / DEFISIT LO</b>	<b>(14.428.222.328,72)</b>

Bantul, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran

Ir. Fenty Yusdayati, MT  
NIP. 196704031996032008



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

SATKER : **BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

SUB UNIT **UNIT INDUK**

NO	URAIAN	2023	2022
1	EKUITAS AWAL	1.660.609.219,62	2.546.845.240,24
2	SURPLUS DEFISIT -LO	(14.428.222.328,72)	(13.368.547.077,12)
3	ASET/EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	13.584.832.633,10	12.378.076.822,50
31	R/K SKPD	0,00	12.378.076.822,50
32	R/K PPKD	0,00	0,00
4	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	(168.468,33)	104.234.234,00
41	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
42	SELISIH EVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
43	KOREKSI EKUITAS LAINNYA	(168.468,33)	104.234.234,00
	<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>817.051.055,67</b>	<b>1.660.609.219,62</b>

Bantul, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran

**Ir. Fenty Yusdayati, MT**  
196704031996032008



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**NERACA SKPD**

PER : 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

**SATKER : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**SUB UNIT : UNIT INDUK**

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah		Kenaikan /(Penurunan)	
		2023	2022	Jumlah	%
<b>1</b>	<b>ASET</b>				
<b>11</b>	<b>ASET LANCAR</b>				
<b>111</b>	<b>Kas dan Setara Kas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11101	Kas di Kas Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
11102	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00
11103	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
11104	Kas di BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00
11105	Kas di Bendahara BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
11106	Kas Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
11107	Kas di Pengelola Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
11108	Kas di Bendahara Blockgrant	0,00	0,00	0,00	0,00
11109	Kas di KPU dan Panwas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Piutang</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11301	Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
1130101	Piutang Pajak (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130102	Penyisihan Piutang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
11302	Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
1130201	Piutang Retribusi (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130202	Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
11304	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
1130401	Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130402	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
11305	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1130501	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130502	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
11306	Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1130601	Piutang Pendapatan Lainnya (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1130602	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>114</b>	<b>Belanja Dibayar Dimuka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11401	Belanja Dibayar Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>115</b>	<b>Piutang Lainnya (Pinjaman yang diberikan kepada masyarakat)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11501	Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
1150101	Piutang Lainnya (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
1150102	Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>116</b>	<b>Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11601	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Jumlah		Kenaikan /(Penurunan)	
		2023	2022	Jumlah	%
117	Piutang Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
11701	Piutang Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Persediaan	16.189.800,00	23.934.350,00	(7.744.550,00)	(32,36)
11901	Persediaan	16.189.800,00	23.934.350,00	(7.744.550,00)	(32,36)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>		<b>16.189.800,00</b>	<b>23.934.350,00</b>	<b>(7.744.550,00)</b>	<b>(32,36)</b>
13	<b>ASET TETAP</b>				
131	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
13101	Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Peralatan dan Mesin	6.079.672.864,00	6.264.341.021,00	(184.668.157,00)	(2,95)
13201	Peralatan dan Mesin	6.079.672.864,00	6.264.341.021,00	(184.668.157,00)	(2,95)
133	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
13301	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
13401	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Aset Tetap Lainnya	12.000.670,00	12.000.670,00	0,00	0,00
13501	Aset Tetap Lainnya	12.000.670,00	12.000.670,00	0,00	0,00
136	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
13601	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Akumulasi Penyusutan	(5.528.247.278,33)	(5.447.385.161,38)	(80.862.116,95)	1,48
13701	Akumulasi Penyusutan	(5.528.247.278,33)	(5.447.385.161,38)	(80.862.116,95)	1,48
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>		<b>563.426.255,67</b>	<b>828.956.529,62</b>	<b>(265.530.273,95)</b>	<b>(32,03)</b>
15	<b>ASET LAINNYA</b>				
15101	Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00
15201	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Aset Tak Berwujud	237.435.000,00	807.718.340,00	(570.283.340,00)	(70,60)
15301	Aset Tak Berwujud	3.180.056.700,00	3.180.056.700,00	0,00	0,00
15306	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(2.942.621.700,00)	(2.372.338.360,00)	(570.283.340,00)	24,04
154	Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
15401	Aset Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Aset Lain Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00	0,00	0,00
15501	Aset Lain Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>		<b>237.435.000,00</b>	<b>807.718.340,00</b>	<b>(570.283.340,00)</b>	<b>(70,60)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>817.051.055,67</b>	<b>1.660.609.219,62</b>	<b>(843.558.163,95)</b>	<b>(50,80)</b>
2	<b>KEWAJIBAN</b>				
21	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00
21101	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00	0,00	0,00
21201	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
21301	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
21401	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
215	Utang Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
21501	Utang Belanja	0,00	0,00	0,00	0,00
21601	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
21602	Utang Uang Jaminan	0,00	0,00	0,00	0,00

No	Uraian	Jumlah		Kenaikan /(Penurunan)	
		2023	2022	Jumlah	%
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00	0,00	0,00
3	EKUITAS				
31	EKUITAS				
311	Ekuitas	817.051.055,67	1.660.609.219,62	(843.558.163,95)	(50,80)
	JUMLAH EKUITAS	817.051.055,67	1.660.609.219,62	(843.558.163,95)	(50,80)
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	817.051.055,67	1.660.609.219,62	(843.558.163,95)	(50,80)

Bantul, 31 Desember 2023

Pengguna Anggaran *z*



Ir. Fenty Yusdayati, MT  
196704031996032008